



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jl. Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telp.(0536) 3221946 Fax. 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id> Pos-el [desdm@kalteng.go.id](mailto:desdm@kalteng.go.id)

**PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN TAHUN 2023**  
**DESDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kegiatan (%)
1.	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>			<b>Rp20.373.567.547</b>	<b>89,9%</b>
	<b>A</b>	<b>Kegiatan :</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Rp342.380.370	91,30%
		a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp92.031.160	92%
		b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp6.307.500	63%
		c)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp4.791.250	47,9%
		d)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp239.250.460	39,8%
	<b>B</b>	<b>Kegiatan :</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp12.772.360.367	89,2%
		a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12.054.860.767	90,6%
		b)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp716.819.600	70,9%
		c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp680.000	66,6%
	<b>C</b>	<b>Kegiatan :</b> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp103.991.440	97,9%
		a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp4.945.940	98,9%
		b)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp99.045.500	97,9%
	<b>D</b>	<b>Kegiatan :</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp88.445.000	44,2%
		a)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp88.445.000	44,2%
	<b>E</b>	<b>Kegiatan :</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp1.502.262.865	95,5%
		a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp29.845.000	99,4%
		b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp271.861.500	97%
		c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp32.034.500	79,4%
		d)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp23.285.000	58,2%
		e)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp37.960.000	94,9%

	f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.066.145.865	97,2%
	g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp41.131.000	91,4%
<b>F</b>	<b>Kegiatan :</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.029.960.000	99,9%
	a)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.029.960.000	99,9%
<b>g</b>	<b>Kegiatan :</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.342.052.698	76,1%
	a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp17.603.000	50,2%
	b)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp475.717.570	89,2%
	c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp848.732.128	71%
<b>H</b>	<b>Kegiatan :</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.192.114.807	76,4%
	a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Rp146.856.746	99,5%
	b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan..	Rp19.265.921	77%
	c)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp73.817.300	67,2%
	d)	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp2.862.344.840	96,7%
	e)	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp89.830.000	99,8%
<b>2.</b>	<b>Pengelolaan Aspek Kegeologian</b>		<b>Rp614.066.581</b>	<b>99,6%</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan :</b>	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi	Rp544.281.181	99,7%
	a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp199.463.481	99,7%
	b)	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp199.809.200	99,9%
	c)	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp145.008.500	99,7%
<b>B</b>	<b>Kegiatan :</b>	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Rp69.785.400	98,6%
	a)	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rp29.625.400	98,7%
	b)	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rp19.840.000	99,2%
	c)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan dan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Rp20.320.000	97,9%
<b>3.</b>	<b>Pengelolaan Mineral dan Batubara</b>		<b>Rp1.775.803.485</b>	<b>95,2%</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan :</b>	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	Rp298.417.000	149,4%
	a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dala 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	Rp199.702.000	99,8%
	b)	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dala 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	Rp98.715.000	98,7%
<b>B</b>	<b>Kegiatan :</b>	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	Rp1.019.831.235	92,7%
	a)	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Rp447.587.559	89,5%
	b)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Rp572.243.676	95,3%
<b>C</b>	<b>Kegiatan :</b>	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara,Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	Rp297.817.000	99,2%
	a)	Penetapan prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara,Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	Rp99.550.000	99,5%

	b)	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	Rp99.802.000	99,8%
	c)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	Rp98.465.000	98,4%
	<b>D</b>	<b>Kegiatan :</b> Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp159.738.250	96,8%
	a)	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp9.750.000	65%
	b)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp149.988.250	99,9%
<b>4.</b>	<b>Pengelolaan Energi Terbarukan</b>		<b>Rp278.029.047</b>	<b>92,6%</b>
	<b>A</b>	<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Rp278.029.047	<b>92,6%</b>
	a)	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Rp91.776.632	91,7%
	b)	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Rp88.430.120	88,4%
	c)	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Rp97.822.295	97,8%
<b>5.</b>	<b>Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>		<b>Rp25.380.009.311</b>	<b>97,8%</b>
	<b>a</b>	<b>Kegiatan :</b> Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp148.145.000	98,7%
	a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp148.145.000	88,7%
	<b>b</b>	<b>Kegiatan :</b> Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Rp49.320.000	98,6%
	a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Rp49.320.000	98,6%
	<b>C</b>	<b>Kegiatan :</b> Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp25.182.544.311	97,8%
	a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp195.456.723	97,7%
	b)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp162.345.230	81,1%
	c)	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp24.824.742.358	97,9%

**Palangka Raya, 15 Agustus 2024**  
**Kepala Dinas,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721213200031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

